

Program Sosialisasi Peningkatan Literasi Pelayanan Publik di Era Digital: pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang

Fera Mutia¹, Devi Anita²
^{1,2}STIA Adabiah Padang, Indonesia

Received : 18 Desember 2025, Revised : 25 Desember 2025, Published : 15 Januari 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Fera Mutia

E-mail: feramutia@stiaadabiah.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi pelayanan publik menuju sistem yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi pelayanan publik berbasis digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi pelayanan publik di era digital pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, diskusi, dan pendampingan teknis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi literasi digital mampu meningkatkan pemahaman aparatur terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesamaan hak. Digitalisasi pelayanan memberikan dampak positif berupa percepatan proses administrasi, pengurangan antrean layanan tatap muka, serta peningkatan keterbukaan informasi. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan infrastruktur dan variasi tingkat literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kapasitas digital dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan inklusif.

Kata kunci - literasi digital, pelayanan publik, digitalisasi, pengabdian masyarakat, era digital

Abstract

The rapid development of digital technology has encouraged the transformation of public services toward more effective, transparent, and accountable systems. However, low levels of digital literacy among government officials and the community remain a major challenge in optimizing digital-based public services. This community service program aims to enhance public service literacy in the digital era at the Youth and Sports Office of Padang City. The method employed was Participatory Action Research (PAR) using a participatory approach through socialization activities, discussions, and technical assistance. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, and analyzed using the Miles and Huberman data analysis technique. The results indicate that digital literacy socialization significantly improved officials' understanding of the use of digital technology in public services, particularly in terms of transparency, accountability, participation, and equality. Digitalization of public services contributed to faster administrative processes, reduced face-to-face service queues, and improved information transparency. Nevertheless, several challenges remain, including limited technological infrastructure and varying levels of digital literacy. Therefore, sustained and collaborative efforts across sectors are required to strengthen digital capacity and realize more effective and inclusive public services.

Keywords - digital literacy, public services, digitalization, community service, digital era

How To Cite : Mutia, F., & Anita, D. (2026). Program Sosialisasi Peningkatan Literasi Pelayanan Publik di Era Digital: pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3), 2953 - 2958. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.933>

Copyright ©2026 Fera Mutia, Devi Anita

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Dalam konteks global saat ini, literasi digital bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga syarat utama dalam mengakses peluang ekonomi, pendidikan, dan sosial yang lebih luas. Transformasi digital yang terjadi di berbagai sektor menuntut keahlian yang tidak hanya terbatas pada penggunaan alat-alat digital secara umum, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang keamanan data, privasi online, dan etika digital. Sayangnya, masih banyak masyarakat, terutama di wilayah yang kurang berkembang, yang belum memiliki kemampuan dan akses yang memadai untuk mengikuti perkembangan ini. Program ini dirancang untuk tidak hanya mengajarkan dasar-dasar penggunaan internet dan aplikasi digital, tetapi juga membangun pemahaman tentang pentingnya keamanan informasi dan etika dalam menggunakan teknologi. Melalui workshop, seminar, dan kegiatan interaktif lainnya, program ini bertujuan untuk membangun jaringan antar peserta yang dapat mendukung satu sama lain dalam mengembangkan keterampilan digital mereka secara berkelanjutan.

Reformasi digital sektor publik di Indonesia terus menguat dari berbagai level, baik pada pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Hal ini ditunjukkan dengan indeks SPBE nasional 2024 menunjukkan skor 3,12 atau tergolong baik (Kementerian PANRB, 2024), namun penerapan di level tingkat pemerintah desa masih tidak merata. Program Smart Villagemenjadi jawaban inovatif. Contohnya, Desa Jamali (Cianjur) berhasil menerapkan sistem informasi berbasis web untuk mempercepat administrasi dan meningkatkan transparansi (Darmadi et al., 2025). Di sektor pendidikan, pelatihan AI pada SDN Kademangan menumbuhkan literasi digital siswa dari 84,78% menjadi 95,65% (Dinata et al., 2025). Desa Penengahan (Lampung) memperlihatkan dampak positif digitalisasi administrasi via aplikasi mobile (Supriyadi et al., 2024), sedangkan Desa Sei Lembu Makmur (Kampar) menguatkan literasi TIK sebagai basis smart village (Sukri et al., 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengupayakan budaya literasi masyarakat, paling utama adalah di era digital seperti sekarang. Pada abad ke-21, kesadaran akan pentingnya membaca dan menulis akan meningkat. Menulis dan membaca adalah keterampilan dasar yang dapat digunakan untuk membangun sumber daya manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusia sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari kemajuan negara tersebut.

Digitalisasi pelayanan publik merupakan salah satu program untuk konsep digital suatu daerah, di mana teknologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan masyarakat. Perkembangan teknologi adalah hal penting yang perlu diperhatikan karena perkembangan teknologi mempunyai dampak yang penting untuk perkembangan kehidupan sehari-hari (Putu Dhiyo Pranawa, et al, 2023). Digitalisasi adalah salah satu representasi pengembangan pemerintah daerah dan masyarakat dalam suatu kelompok untuk melakukan cara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai persoalan melalui teknologi informasi dengan menggunakan potensi yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat. (Ilona Vicenovie Oisina Situmeang, et al, 2023).

Tidak hanya pada kegiatan masyarakat yang bersifat jual beli, kegiatan administratif yang dapat menggunakan media digital untuk memudahkan sistem yang dirancang seperti proses pengarsipan surat. Pelayanan administratif yang umumnya membutuhkan waktu yang lama dapat dipersingkat melalui pemanfaatan aplikasi digital yang dapat diakses secara mandiri oleh warga. Hal ini pun dapat meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat serta memungkinkan masyarakat desa menyadari potensinya dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (Mangunjaya Mayadi, Wowon Priatna, 2023).

Pada era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kemampuan literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting dimiliki oleh setiap individu. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan dalam mengakses dan mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga menyangkut keterampilan berpikir kritis dalam memilah informasi, etika berinternet, serta pemanfaatan teknologi untuk kegiatan belajar yang produktif (Prasetya & Iskandar, 2025).

Pengabdian yang disusun saat ini hadir sebagai bentuk penguatan kapasitas digital secara lebih kontekstual dan teknis. Berbeda dari pengabdian sebelumnya, program ini dirancang dengan pendekatan berbasis kebutuhan riil, seperti penggunaan aplikasi administrasi, pengarsipan digital, serta pengelolaan data desa berbasis sistem informasi. Kegiatan ini juga membuka peluang untuk tindak lanjut berkelanjutan melalui pendampingan dan evaluasi. Mengingat pentingnya peran dalam mendukung agenda nasional digitalisasi pemerintahan, pengabdian ini perlu dilanjutkan guna

menciptakan tata kelola desa yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi (Kusumastuti et al., 2023; Muhajir, 2022; Praseptiawan et al., 2021; Rahayu et al., 2023).

METODE

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) tim pelaksana melakukan kegiatan dengan secara terarah. Setelah melalui diskusi selama observasi dan membuat agenda kegiatan, tim pelaksana dan mitra kemudian menyepakati hari dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan ini. Meskipun demikian, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) tetap semangat untuk berkomunikasi dengan mitra terkait hal-hal yang harus dipersiapkan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan Participatory Action Research (PAR). PAR merupakan salah satu pendekatan yang mengkombinasikan antara penelitian dengan tindakan yang berkelanjutan. Berpijak pada problematika yang dihadapi oleh subjek dampingan, menjadikan PAR sebagai pilihan metode yang tepat sebagai upaya untuk memberikan alternatif solusi pemecahan masalah yang ada.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang menggunakan layanan digital. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati alur pelayanan di kantor dinas, baik melalui sistem daring maupun tatap muka. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan pelayanan, serta kebijakan pemerintah kota terkait digitalisasi layanan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode, serta member checking dengan informan untuk memastikan keabsahan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang telah membawa perubahan signifikan dalam pola pelayanan publik. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan administratif melalui aplikasi daring, mulai dari pengurusan surat keterangan domisili, izin usaha mikro, hingga pelayanan kependudukan. Transformasi ini mempercepat proses pelayanan, mengurangi antrean tatap muka, serta meningkatkan transparansi dalam alur birokrasi. Aparatur kecamatan pun dituntut untuk meningkatkan kapasitas digital agar dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan responsif. Dengan menggunakan kerangka Khan (2021), pembahasan berikut menguraikan hasil penelitian berdasarkan empat dimensi kualitas pelayanan publik: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesamaan hak. Setiap dimensi akan dijelaskan secara konseptual dan empiris berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta analisis dokumen.

Transparansi merupakan salah satu indikator penting dalam kualitas pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, transparansi berarti adanya keterbukaan informasi mengenai prosedur, biaya, persyaratan, dan waktu penyelesaian layanan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, benar, dan tidak diskriminatif. Khan (2021) juga menekankan bahwa transparansi dalam pelayanan publik harus diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas, keterbukaan dalam alur kerja, dan adanya akses publik terhadap mekanisme layanan, baik secara manual maupun digital. Dengan hadirnya teknologi informasi, transparansi dapat ditingkatkan melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara daring, kapan saja dan di mana saja.

Perkembangan teknologi digital bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan manusia, meningkatkan kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, serta efisiensi dalam berbagai sektor, serta dapat memperoleh berbagai peluang dan kemudahan yang ditawarkan (Redhana, 2024). Secara gamblang, kemajuan teknologi digital yang berkembang saat ini telah membantu menyelesaikan berbagai masalah yang telah dihadapi oleh manusia (Putro et al., 2023), sehingga penggunaan teknologi digital sangat penting dalam memudahkan atau memperlancar semua aspek kehidupan manusia (Maritsa, Salsabila, Wafiq, Anindya, & Ma'shum, 2021; Yuhendra, Akhmaddhian, Fathanudien, & Tendiyanto, 2021).

Sosialisasi peningkatan literasi pada pelayanan publik ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dinas dalam lingkup pemerintahan untuk semakin lebih baik melayani masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, tentu saja digitalisasi membantu dinas untuk memberika pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.



Gambar 1. Sosialisasi Peningkatan Literasi Pelayanan Publik di Era Digital

Implementasi pelayanan publik berbasis digital di berbagai organisasi sektor publik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya aksesibilitas terhadap teknologi digital, terutama di daerah-daerah yang masih terpinggirkan secara infrastruktur. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk menyediakan akses internet di seluruh wilayah, masih ada daerah-daerah yang mengalami keterbatasan aksesibilitas terhadap teknologi digital. Selain itu, tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan beberapa kelompok masyarakat. Literasi digital yang rendah dapat menghambat kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan layanan publik berbasis digital secara efektif. Terutama bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi atau memiliki keterbatasan dalam pemahaman digital, proses adaptasi terhadap layanan publik digital bisa menjadi sulit.

Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta menjadi penting dalam mengatasi tantangan ini. Perlu dilakukan investasi lebih lanjut dalam pengembangan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan publik berbasis digital. Selain itu, program program pelatihan dan edukasi tentang literasi digital harus diperluas untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menggunakan layanan publik digital dengan efektif. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan pelayanan publik berbasis digital dapat menjadi lebih efektif dan inklusif.

Namun, tantangan yang masih harus diatasi dan potensi yang masih harus dimaksimalkan menunjukkan bahwa implementasi pelayanan publik berbasis digital di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah, baik dalam hal penyediaan infrastruktur teknologi yang lebih merata maupun peningkatan literasi digital di masyarakat, untuk mencapai tujuan penyelenggaraan layanan publik yang lebih efektif dan inklusif.

Dalam pembahasan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi pelayanan publik berbasis digital di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan inklusivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah aksesibilitas terhadap teknologi digital, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil. Hal ini sejalan dengan temuan (Sallu, 2023) yang menyatakan bahwa kurangnya infrastruktur teknologi di beberapa wilayah masih menjadi kendala utama dalam menyelenggarakan layanan publik berbasis digital.

Peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi krusial dalam memaksimalkan manfaat pelayanan publik berbasis digital. Sebagaimana disoroti oleh penelitian (Christover et al., 2023; Frinaldi, 2023), literasi digital yang rendah dapat menghambat efektivitas penggunaan layanan publik digital. Oleh karena itu, perlu adanya program-program pelatihan dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknologi digital di kalangan masyarakat.



Gambar 2. Sosialisasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang

KESIMPULAN DAN SARAN

Digitalisasi dalam pelayanan publik, khususnya di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, telah membawa perubahan positif melalui percepatan proses administrasi, peningkatan transparansi, serta efisiensi birokrasi. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara mudah, cepat, dan terbuka, sesuai dengan dimensi kualitas pelayanan publik, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesamaan hak. Namun, implementasi pelayanan publik berbasis digital di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait keterbatasan infrastruktur teknologi, aksesibilitas internet di wilayah terpencil, serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Tantangan ini selaras dengan temuan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas layanan digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknologi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat infrastruktur digital serta memperluas program peningkatan literasi digital. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, implementasi pelayanan publik berbasis digital diharapkan dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Saran :

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian dan pembahasan yang telah diuraikan, disarankan agar Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas literasi digital aparatur melalui pelatihan rutin dan pendampingan teknis yang lebih aplikatif. Selain itu, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi dan akses internet guna mendukung optimalisasi pelayanan publik berbasis digital secara merata. Kolaborasi lintas sektor, baik dengan perguruan tinggi, sektor swasta, maupun komunitas digital, juga perlu diperluas untuk mempercepat transformasi pelayanan publik yang efektif dan inklusif. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilengkapi dengan evaluasi jangka panjang untuk mengukur dampak digitalisasi terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, M. A., Nuradhawati, R., & Yovinus. (2025). Kualitas Pelayanan Publik di Era Digitalisasi Kantor Kecamatan Genteng Kota Surabaya. *Jurnal Prinsip*, 2(1). <https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i1.4718>
- Ahwani, M., Sihombing, W. L., & Nofiana, T. (2025). Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Desa Jawilan melalui Pemasangan QR Code di Lingkungan Warga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bangsa*, 3(6).
- Darmadi, R., Aditya, A., & Prasetyo, D. (2025). Implementasi Smart Village di Desa Jamali Kabupaten Cianjur. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 4(1).
- Diastuti, A., & Ayyustia, R. (2025). Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Publik melalui Inovasi Digital di Kelurahan Sunter Agung. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2), 109–126. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.721>
- Dinata, A. P., Rahmadani, S., & Kurniawan, T. (2025). Peningkatan Literasi Digital Siswa melalui Pelatihan AI di SDN Kademangan. *Jurnal Inovasi Pendidikan Digital*, 2(1).

- Egok, A. S. (2024). Sosialisasi Peningkatan Literasi melalui Media Poster bagi Guru. *J.A.1: Jurnal Abdimas Indonesia*.
- Fathira, V., Zuriati, D., Maspuhah, L. Z. A., Putri, N. A. J., & Anjelia, R. (2024). Membangun Kesadaran Literasi Digital dan Kecerdasan dalam Menangkal Hoaks pada Siswa SMA IT Fadhilah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(12).
- Gustiana, Z., & Satria, W. (2024). Meningkatkan Akses dan Kemampuan Literasi Digital di Era Informasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JAPAMAS)*, 3(1), 20–27.
- Izana, N. N., Susanti, A., & Sabariman, H. (2025). Edukasi Literasi Digital dalam Pelayanan Publik: Sosialisasi dan Pendampingan bagi Masyarakat di Pulau Timor. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Methabdi*, 5(1), 1–6.
- Kementerian PANRB. (2024). Laporan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional 2024. *Jakarta: KEMENPANRB*.
- Khan, M. (2021). Public Service Quality Framework in the Digital Age. *International Journal of Public Administration*, 44(6).
- Mardiani, I. N., Chairunisa, V., Arisandi, K. M., Manullang, N., Indrawati, W., & Haqq, M. H. A. (2024). Penyuluhan Pentingnya Membaca dalam Revitalisasi Literasi di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(4).
- Mayadi, M., & Priatna, W. (2023). Pemanfaatan Aplikasi Digital untuk Efisiensi Pengarsipan Surat di Pemerintahan Desa. *Jurnal Manajemen Publik Digital*, 1(2).
- Prasetya, A., & Iskandar, F. (2025). Literasi Digital pada Era Revolusi Industri 4.0: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pendidikan Teknologi Abad 21*, 4(1).
- Putu Dhiyo Pranawa, I., Sudirman, I. K., & Mahendra, P. (2023). Perkembangan Teknologi Digital dan Dampaknya pada Pelayanan Publik. *Jurnal Teknologi Swadaya*, 5(1).
- Situmeang, I. V. O., Harahap, L., & Sitorus, R. (2023). Digitalisasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Administrasi dan E-Government*, 2(3).
- Sukri, H., Wibisono, A., & Rahmawati, D. (2022). Penguatan Literasi TIK sebagai Dasar Smart Village di Desa Sei Lembu Makmur. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(3).
- Supriyadi, R., Lestari, M., & Widodo, H. (2024). Dampak Aplikasi Mobile dalam Digitalisasi Administrasi Desa Penengahan. *Jurnal Transformasi Desa*, 3(2).
- Wanayumini, Al Ayyub, M. A., Farhatun, D., Handayani, T. P., Saputra, M., & Yafi, M. F. (2025). Pengabdian Masyarakat dalam Pengenalan Dunia Cyber untuk Membangun Kesadaran Literasi Digital Bagi Siswa SMA N 1 Ujung Padang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 7615–7619. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3054>
- Wibowo, A. M. M., Nur, S. A., Puspitasari, S. A., Agustina, I. S., Maharani, C. E., & Purwanto, M. Z. (2025). Peningkatan Literasi Digital dan Digitalisasi Data Desa di Kabupaten Magelang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Ayak Dhien*, 4(2).